ZAKAT DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

MASNI

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Gowa

Email: masniana24@gmail.com

Abstrak : *Tulisan ini bertujuan untuk mendeskriptifkan zakat dalam perspektif ekonomi islam dengan menggunakan studi pustaka. Bahwa zakat dalam perspektif ekonomi islam mempunyai potensi yang signifikan, maka zakat perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat bisa menjadi solusi alternatif bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat tidak hanya memiliki nilai keagamaan tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan.*

Kata kunci: zakat, perspektif, ekonomi, ekonomi islam

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun islam, sehingga zakat secara otomatis adalah suatu kewajiban mutlak bagi semua umat muslim. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu landasan keimanan bagi seorang umat muslim, dan zakat juga dapat dijadikan indikator kualitas keislaman seseorang yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslimnya.

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*) sehingga golongan kaya dan golongan fakir miskin menjadi lebih harmonis. Dengan begitu golongan fakir miskin bisa menjalankan kegiatan ekonomi dalam kehidupannya.

Zakat juga memiliki peran yang sangat luas. Salah satunya, zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan dalam masyarakat. Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang di kelola dengan baik dan distribusikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, *mustahiq* diharapkan berubah menjadi *muzakki*. Sehingga mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat.¹

Ekonomi islam merupakan suatu ilmu ekonomi yang berkarakter normatif dan positif,² karena standarisasi nilai-nilai ekonomi islam melalui Al-Qur'an dan hadis (normatif), serta praktek perekonomian (*economic activity*) pada asasi nabi (positif), maka zakat dalam perspektif ekonomi islam memiliki satu kesatuan nilai yang koheren.³

¹ Ririn Arifah, 7, no. 1 (2014): 634, <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.

² M. Hanafi Zuardi, "OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM," 1384, 15–34.

³ Zuardi.

B. Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang di kutip oleh Dr. Yusuf Kardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁴ Zakat dalam pengertian fiqh adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Keharusan dalam berzakat ini di tegakkan dalam Al-Qur'an.⁵

Beberapa pengertian zakat menurut istilah yaitu:

- 1) Zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada *mustahiq*⁶ yang di sebutkan dalam Al-Qur'an.
- 2) Menurut istilah *syara'* zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada orang yang berhak atau fakir miskin dengan syarat yang telah di tentukan dalam *syara'*.
- 3) Zakat adalah harta orang yang wajib di bayarkan oleh orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dibayarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang yang berhak mendapatkannya.
- 4) Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerinya. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke lima dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan.

C. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Umat Islam

Zakat memiliki banyak hikmah dan pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat isla. Dengan berzakat berarti orang telah mensyukuri nikmat harta yang telah di berikan oleh Allah SWT.

Difadlukan zakat terhadap harta orang-orang kaya, tidak saja untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi dari bencana kelaparan.

Zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran yang diakui oleh salah seorang *hukama'*, pokok segala bencana, pokok kebencian orang menjadi suber tindakan kejahatan dan buruk sangka. Yang menjadi musuh masyarakat banyak ialah kefakiran dan kerakusan serta kebakhilan yang mengeluarkan harta pada jalan Allah SWT.⁷

D. Pengelolaan Zakat Secara Profesional

⁴ Ririn Arifah, "B A B li dan A Seputar Zakat, "Orang yang berhak menerima zakat. 13," n.d., 13–46.

⁵ Zuardi, "OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM."

⁶ li dan Zakat, "Orang yang berhak menerima zakat. 13."

⁷ Maria Ulfa Sitepu, "Zakat Dan Perekonomian Umat Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 51, <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046>.

Institusi zakat harus didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok penerima zakat. Seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, harus memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, sehingga tingkat pengangguran bisa diminimalisir. Kita perlu banyak belajar dari negara Malaysia dalam mengelolah masalah zakat. Malaysia adalah contoh negara yang berhasil dalam menjadikan zakat sebagai institusi yang mampu mereduksi tingkat kemiskinan, tentu dengan kriteria kemiskinan yang berbeda di Indonesia. Kita berharap dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka segala potensi zakat di Indonesia yang mencapai 6,3 triliun rupiah per tahunnya (menurut perhitungan Dr KH Didin Hafidhuddin, ulama pakar zakat) akan dapat dioptimalakan. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mampu emerankan dirinya sebagai pengelola zakat yang tidak hanya bersifat amanah, tetapi juga bertanggung jawab, transparan dan profesional.⁸

E. Pelaksanaan Zakat

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terperinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting ialah ketentuan-ketentuan mengenai:⁹

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
3. Bersarnya zakat yang di pungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (haul).
5. Jenis-jenis penerima zakat.
6. Cara-cara pembagiannya.

Pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita menampung perkembangan berbagai kekayaan dan pemilikan yang di kembangkan, demi encapai sasaran atau hikmah dari zakat tersebut.

F. Fungsi dan Tujuan BAZ

Sebagai pelaksana perda zakat, BAZ berfungsi merumuskan tata cara pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) juga melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sesuai syariat Islam.¹⁰

G. Sasaran zakat

Sasaran zakat berdasarkan jumhur ulama fiqh engacu pada *asnaf* yang tercantum dalam firman Allah QS. at-Taubah 9:60 sebagai berikut:¹¹

⁸ Sitepu.

⁹ Sitepu.

¹⁰ S Syamsinar, "Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," 2012, <http://repository.uin-alaudidin.ac.id/id/eprint/10446>.

¹¹ Samsul, "TUJUAN DAN SASARAN ZAKAT DALAM KONTEKS IBADAH DAN MUAMALAH," *IBEF* 1 (2020): 87–88.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, Sayid Muhammad Rasyid Ridha dalam Asnaini membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut dalam dua bagian:

- 1.) Kepada individu-individu dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:
 - a.) Golongan fakir (*fuqara>'*), yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - b.) Golongan miskin (*masa>ki>n*), yang tidak mempunyai apa-apa.
 - c.) Golongan para pegawai zakat (*'a>mili>n*), yang bekerja untuk mengukur pemungutan dan pembagian zakat.
 - d.) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafatiqulu>buhum*) yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
 - e.) Golongan orang-orang yang terikat hutang (*gha>rimi>n*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu
 - f.) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabi>l*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.
- 2.) Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka yang berhak menerima zakat:
 - a.) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing (individu) atau bagi suatu golongan atau suatu bangsa, yang di namakan *fial-riqa>b*.
 - b.) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang di namakan *fisabi>li Allah*.¹²

H. Zakat Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan

Potensi sumber dana umat Islam, diantaranya zakat yang mana dikeluarkan oleh pemiliknya serta perhitungan tentang jumlah yang harus dikeluarkan, maka bila

¹² Samsul.

dikelola dengan manajemen modern maka kemiskinan dapat dikurangi secara berangsur, sehingga pembayar zakat semakin banyak pertahunnya. Pendistribusian kepada kaum fakir adalah zakat harta bukan zakat fitrah sebab zakat fitrah dalam penggunaannya harus dikonsumsi pada hari lebaran.

Muchtahir Efendy mengemukakan dua alternatif dalam upaya pemberdayaan zakat:

a. Pendekatan persial

Persial berarti *forming only a part, not complete* atau sebagian tidak menyeluruh. Pendekatan semacam ini merupakan pertolongan yang dilakukan secara langsung dan bersifat insidental, variatif dan hanya *temporary relief* (peringanan bebas sesaat) . dalam konteks kesejahteraan sosial, pendekatan semacam ini disebut juga pendekatan tradisional. Dengan pendekatan ini dampak pendistribusian zakat ada dua cara:

1. Konsumtif Tradisional

Dalam hal ini zakat hanya dapat dimanfaatkan oleh mustahiq secara langsung. Bentuk ini lebih sesuai diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu berusaha mencari rezeki di sebabkan misalnya insannya sudah lemah atau halangan lain yang dapat diterima oleh akal.

2. Konsumtif kreatif

Dalam hal ini mustahiq dapat mengembangkan dan memanfaatkan zakat misalnya pembelian alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Bentuk ini lebih sesuai diberikan untuk mereka yang benar-benar kekurangan tetapi mempunyai potensi untuk mengembangkan diri.

b. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural atau juga disebut institusional atau produktif yakni cara pendistribusian zakat secara kontinyu atau pendekatan yang lebih cenderung kepada usaha pengadaan atau perubahan secara terencana dengan pendekatan ini, sebab kemiskinan, keterbelakangan atau kelemahan. Melalui pendekatan ini pendistribusian zakat ada dua cara:¹³

1. Produktif Tradisional

Yakni zakat dapat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, kerbau, lembu, mesin, mesin cetak, alat ukur, peralatan bengkel atau pertukangan dan lain-lain. Bentuk ini lebih sesuai diberikan kepada mereka yang tergolong mustahiq yang mampu dan kuat berusaha.

2. Produktif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk menabuh modal bagi pedagang kecil.

Menurut **Nejatullah Siddiqi** mengemukakan bahwa beberapa ekonomi muslim beranggapan bahwa distribusi konsumtif mempunyai kecenderungan menimbulkan inflasi, sebab zakat pada hakekatnya adalah pemindahan sebagian kekayaan kepada kaum yang membutuhkan.

¹³ Syamsinar, "Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Rappocini Kota Makassar."

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki potensi yang signifikan maka zakat perlu perhatian lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Hingga zakat dapat menjadi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat tidak hanya memiliki nilai keagamaan tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ii, B A B, dan A Seputar Zakat. "Orang yang berhak menerima zakat. 13," n.d., 13–46.
- Ririn Arifah. "No Title" 7, no. 1 (2014): 634.
<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.
- Samsul. "TUJUAN DAN SASARAN ZAKAT DALAM KONTEKS IBADAH DAN MUAMALAH." *IBEF* 1 (2020): 87–88.
- Sitepu, Maria Ulfa. "Zakat Dan Perekonomian Umat Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 51. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046>.
- Syamsinar, S. "Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," 2012.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/10446>.
- Zuardi, M. Hanafi. "OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM," 1384, 15–34.